

Ali Usman, Ketua PATAKA

Strategi dan Implementasi Kebijakan: Dalam Kemandirian Bibit (Ayam Broiler) dan Ketersediaan Jagung Berkualitas dengan Harga Terjangkau

DASAR PEMIKIRAN

Bisnis ayam *broiler* menimbulkan *oversupply* oleh kelompok usaha dominan yaitu perusahaan raksasa yang menguasai sektor usaha hulu hilir. Sedangkan peternak rakyat sebagai kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) banyak bergantung Sarana Produksi Ternak (sapronak) dengan perusahaan pembibit (*breeding*) pemegang kendali alat produksi ternak tersebut. Tidak sedikit peternak kelas gurem atau UMKM ini berguguran karena tidak mampu bersaing dalam berbudidaya dengan kelompok usaha raksasa tersebut.

KAJIAN EMPIRIS

Ketidakmampuan peternak kelas UMKM karena ketergantungan sapronak oleh perusahaan raksasa yang menyediakan DOC FS, pakan dan obat-obatan dengan penentuan harga sepihak. Artinya peternak mandiri memiliki nilai tawar rendah dalam penentuan harga, sedangkan harga *livebird* berfluktuasi tinggi. Mestinya kemandirian Bibit FS dan pakan juga diberikan leluasa kepada peternak UMKM terutama yang naik kelas (*scale up*). Pemerintah berkewajiban melindungi semua pihak karena semuanya telah menyerap tenaga kerja dan menghidupkan ekonomi daerah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Dalam menciptakan iklim usaha ayam broiler nasional, semua stakeholder baik peternak, industri dan pemerintah diharapkan melakukan sinergitas dan kolaborasi yang mapan. Juga dapat memberikan rekomendasi yang positif bagi pemerintah untuk memperkuat penugasan BUMN, sehingga tercipta iklim yang efektif, efisien dan berdaya saing untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga ayam ras.
2. Skema pengadaan DOC untuk peternak melalui BUMN Berdikari harus diperjelas, karena mendapatkan insentif kuota importasi GPS. Berdikari dengan segala keterbatasannya dalam menyediakan DOC dengan harga stabil. Namun peternak penerima belum terdaftar menyeluruh.
3. Pemerintah perlu mengatasi keterbatasan modal kerja, supaya BUMN Berdikari bisa menggandeng BUMN Himbara. Jika Berdikari masih lemah dalam menyerap *livebird* karena keterbatasan *cash flow*. Maka Berdikari hanya menyerap peternak yang mitra saja. Untuk itu, peternak yang belum mitra, maka wajib bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Kementan dan Kementan.
4. Untuk meningkatkan konsumsi daging nasional. Maka pemerintah perlu mendorong dan melakukan kampanye konsumsi daging ayam melalui rantai dingin, karena berkaitan dengan frekuensi permintaan atas konsumsi. Diperlukan strategi secara berkelanjutan oleh semua kelas *market size* terutama retail.
5. Pemerintah harus turun dalam dalam memberikan penugasan kepada BUMN yang berkepentingan tidak hanya menyerap saja. Tetapi juga perlu membangun cold storage, RPHU, dan *channel* distribusi untuk membantu peternak. Juga perlu didorong membangun pabrik olahan daging yang dapat disimpan lama, sehingga dapat menstabilkan *livebird* di daerah terutama sentra produksi ayam.
6. Pemerintah Cq. Kementan perlu menyediakan data konkret jagung untuk pakan ternak. Sehingga perlu ada penyesuaian data dari Kementan dan Kemendag supaya dapat menyusun neraca sesuai dengan data yang riil di lapangan.
7. Peternak skala kecil harus membangun koperasi agar bisa bergabung ke integrator horizontal. Begitupun dengan peternak mandiri untuk menyediakan sapronak (bibit dan pakan beraliansi dengan non integrator vertikal.
8. Kemendag harus melakukan intervensi manakala harga DOC diatas harga acuan dan manakala harga *livebird* dibawah acuan. Jika ada SE yang dikeluarkan Kementan harus dikuatkan pula dengan SE Kemendag guna menjaga harga DOC karena semua 'pemain' akan tunduk dengan peraturan SE.
9. Kebutuhan Impor jagung tidak harus digantikan oleh gandum karena menjadi boomerang suatu saat. Yaitu ketika petani panen jagung bahkan surplus dikonsumsi bulan-bulan tertentu, disisi lain masih ingin tetap menggunakan gandum.